

CERITA 2025

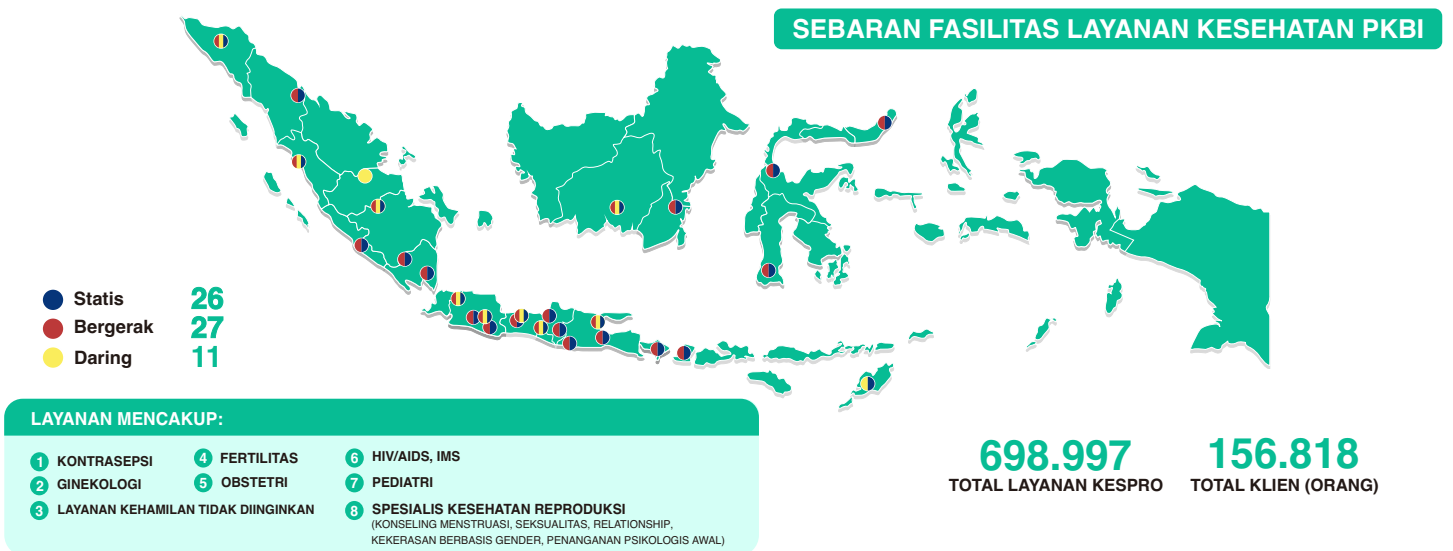
Cermin Realitas Tahunan
Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia

PENGANTAR

Sejak 1957, PKBI telah menjadi pelopor yang memperjuangkan hak kesehatan seksual reproduksi (HKSR) di Indonesia. Melalui laporan **CERITA 2025**, kami menunjukkan bagaimana ribuan relawan dan tenaga kesehatan di PKBI dengan sepenuh hati memberikan layanan kesehatan seksual dan reproduksi untuk perempuan dan kelompok rentan. Dokumen ini bukan sekadar catatan tahunan, melainkan instrumen advokasi berbasis data yang transparan untuk membuktikan bahwa akses kesehatan yang aman adalah fondasi utama bagi keadilan sosial.

Kekuatan data yang dihimpun sepanjang tahun 2025 menjadi landasan PKBI terhadap target **Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)**, terutama pada sektor kesehatan, kesetaraan gender, dan pengurangan kesenjangan. Dengan fokus pada inklusivitas bagi remaja hingga penyandang disabilitas, PKBI memastikan tidak ada satu pun individu yang tertinggal dalam mendapatkan layanan yang bermartabat. Upaya kolektif ini adalah kontribusi nyata dalam mengawal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan menyiapkan generasi tangguh demi mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.

Memperkuat Kehidupan Sehat dan Sejahtera melalui Layanan Kesehatan Reproduksi yang Inklusif

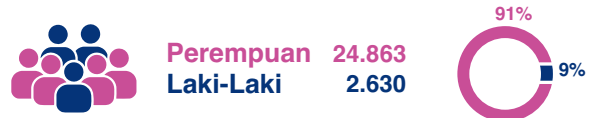


Capaian Strategis PKBI dalam Mendukung SDGs 3 dan Kesehatan Ibu

Tahun 2025 menjadi bukti nyata kontribusi PKBI terhadap target SDGs 3, khususnya dalam menekan Angka Kematian Ibu (AKI).

Melalui penguatan layanan kesehatan ibu yang komprehensif, PKBI telah memberikan lebih dari 2.214 layanan konsultasi kehamilan dan 902 layanan USG. Kehadiran tenaga kesehatan PKBI yang kompeten memastikan perempuan dari kelompok rentan, yang selama ini terisolasi dari sistem kesehatan formal, mendapatkan pendampingan medis yang aman dan bermartabat selama masa kehamilan.

Presentase Penerima Layanan Kontrasepsi berdasarkan Jenis Kelamin



PKBI memberikan 27.405 layanan kontrasepsi dengan 17% di antaranya menggunakan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) berupa IUD dan implan. Capaian ini berkontribusi pada pemenuhan kebutuhan KB perempuan usia 15–50 tahun dengan metode modern, sekaligus menjadi strategi penting dalam pencegahan kehamilan tidak direncanakan, termasuk pada kelompok remaja.

Akses Kontrasepsi Modern dan Pencegahan Kanker Serviks

Konseling Umum Kontrasepsi

18.996 orang

Layanan Kontrasepsi Jangka Panjang (IUD dan Implan)

4.576 orang

Layanan Kontrasepsi Jangka Pendek (Kondom, Pil, Suntik)

2.658 orang

Layanan Kontrasepsi Permanen (Vasektomi dan Tubektomi)

970 orang

Layanan Kontrasepsi Darurat (Pil)

205 orang

Total Klien

27.405 orang

Dalam rangka perlindungan terhadap korban kekerasan berbasis gender (KGB) dan perempuan yang mengalami kegagalan Kontrasepsi, PKBI juga memberikan layanan konsultasi dan konseling kontrasepsi darurat sebanyak 205 orang.

Target 3.3 Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan Infeksi Menular Seksual (IMS)

PKBI juga berperan dalam mendukung target SDGs 3.3 tentang pencegahan dan penanggulangan HIV dan IMS. PKBI berperan strategis dalam memberikan respon HIV dan IMS dengan menyediakan layanan komprehensif, mudah diakses, dan berpusat pada kebutuhan klien.

Semua layanan ini adalah bagian dari perjuangan PKBI untuk pemenuhan HKSR bagi setiap orang, tanpa stigma dan tanpa diskriminasi.

LAYANAN HIV 2025



TOTAL LAYANAN
367.737

TOTAL KLIEN
135.849

107.103 Layanan
SKRINING & TATA LAKSANA IMS

Sebagai bagian dari upaya pencegahan infeksi lanjutan dan komplikasi kesehatan reproduksi



JENIS LAYANAN HIV YANG DIBERIKAN

KONSELING PENGURANGAN RESIKO
TES HIV CEPAT
TERAPI ANTIRETROVIRAL
PREP (PENCEGAHAN HIV SEBELUM TERPAPAR)

KONSELING PRA DAN PASCA TES HIV
Pemeriksaan VIRAL LOAD
PEP (PENCEGAHAN HIV SETELAH TERPAPAR)

PKBI percaya bahwa setiap orang berhak atas layanan kesehatan yang tersedia, informasi yang akurat dan dapat dipercaya, serta perlakuan yang setara, tanpa stigma, di mana data ini mencerminkan komitmen PKBI untuk memastikan hak kesehatan seksual dan reproduksi (HKSR) terpenuhi melalui layanan yang inklusif, berkualitas, dan berorientasi pada kebutuhan klien.

Penyediaan Layanan KTD yang Aman dan Inklusif

LAYANAN KTD (KEHAMILAN TIDAK DIINGINKAN) 2025

1.582 Perempuan

Mendapatkan layanan KTD yang aman di klinik PKBI, layanan meliputi:

- ◆ KONSELING PRA-ABORSI
- ◆ LAYANAN KONSULTASI
- ◆ TINDAKAN MEDIS & BEDAH YANG AMAN
- ◆ KONSELING PASCA-ABORSI



Layanan ini menyelamatkan perempuan dari risiko aborsi tidak aman, salah satu penyebab kematian ibu. Di Indonesia, data resmi mengenai penanganan KTD yang aman masih sangat terbatas dan isu legalitas masih kompleks. Data PKBI menjadi salah satu rujukan penting yang menunjukkan besarnya kebutuhan layanan ini.

Tantangan Layanan KTD Berdasarkan UU No 1 Tahun 2023 Tentang KUHP



Pasal 408-410 (Promosi Kontrasepsi)

Melarang promosi kontrasepsi kepada anak, kecuali oleh "petugas yang berwenang" untuk program KB, pencegahan IMS, atau pendidikan kesehatan.



Ketidakjelasan definisi "petugas berwenang" membuka peluang kriminalisasi terhadap petugas lapangan dan edukator kesehatan di tingkat komunitas.



Pasal 411 & 412 (Perzinaan & Kohabitasi)

Meski merupakan delik aduan, pasal ini berpotensi mempersempit ruang aman layanan komunitas.



Risiko pengawasan berlebihan, stigma, dan praktik profiling terhadap kelompok rentan dapat menghambat akses layanan kesehatan seksual dan reproduksi yang aman dan rahasia.



Pasal 463 (Pengecualian Aborsi)

Memperluas pengecualian kriminalisasi aborsi bagi korban kekerasan seksual hingga usia kehamilan 14 minggu. Ini adalah kemajuan penting.



Tantangan administratif dan kebutuhan rujukan cepat tetap krusial agar ketentuan ini benar-benar dapat diakses oleh korban.



Dampaknya

Jika tidak diantisipasi, ketentuan-ketentuan ini dapat:

Menghambat akses kelompok rentan pada layanan yang aman dan rahasia

Meningkatkan Rasa Takut dan Raguh bagi penyedia layanan

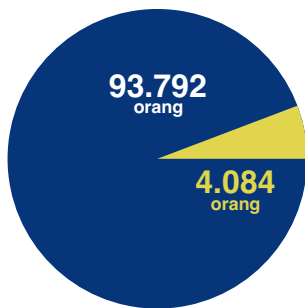
Mengancam keberlanjutan layanan kesehatan seksual dan reproduksi berbasis komunitas

Kesetaraan Gender sebagai Pondasi Pemenuhan Hak Kesehatan Reproduksi

Tahun 2025 menegaskan peran strategis PKBI dalam mendukung SDGs 5 tentang Kesetaraan Gender. PKBI memandang bahwa kesetaraan bukan sekadar tujuan, melainkan prasyarat mutlak agar perempuan dan anak perempuan dapat memiliki kendali penuh atas hak kesehatan seksual dan reproduksinya (HKSR). Tanpa kesetaraan, akses terhadap kesehatan akan selalu terhambat oleh stigma dan ketimpangan relasi kuasa.

Aksi Nyata Menghapus Kekerasan Terhadap Perempuan

Diagram Penerima Manfaat Skrining dan Layanan KBG



PKBI berkontribusi melalui penguatan layanan bagi korban Kekerasan Berbasis Gender (KBG), yang mencakup kekerasan fisik, seksual, dan bentuk kekerasan lainnya baik oleh pasangan maupun non-pasangan. Sepanjang tahun 2025, **PKBI mencatat 93.792 orang yang mendapat layanan skrining KBG**. Skrining ini merupakan langkah krusial untuk mendeteksi tanda-tanda kekerasan fisik maupun seksual sedini mungkin, sehingga penyintas bisa segera mendapatkan penanganan medis dan psikologis yang tepat. **Melalui proses skrining yang dilakukan, 4.084 orang berhasil dijangkau dan mendapatkan layanan konseling KBG sebagai tindak lanjut.**

Tingginya angka akses layanan di PKBI didorong oleh sistem rujukan yang komprehensif. PKBI bekerja sama dengan Satgas, penyedia bantuan hukum, dan rumah aman (*shelter*) untuk memastikan penyintas mendapatkan perlindungan yang utuh.

Melalui keterlibatan konselor sebaya dan profesional, PKBI menciptakan ruang aman yang menjamin kerahasiaan dan privasi, sehingga penyintas merasa berdaya untuk memulai proses pemulihan jangka panjang. PKBI berperan menjadi layanan alternatif untuk memfasilitasi para korban KGB yang tidak mendapat pelayanan oleh pemerintah.

Penghapusan Praktik Sunat bagi Anak Perempuan

Sejalan dengan Target 5.3 SDGs, PKBI bergerak aktif dalam menghapus praktik berbahaya seperti perkawinan anak dan sunat perempuan (FGM). Fokus utamanya adalah memperkuat kesadaran masyarakat akan hak atas tubuh bagi anak perempuan. Berikut beberapa hal yang telah dilakukan PKBI selama 2025:



Edukasi ke para peer edukator remaja PKBI di 25 daerah

Kampanye publik di 2 wilayah bebas kendaraan bermotor (Jakarta dan Sumbar)



Edukasi ke 13 Sekolah dan Universitas di berbagai wilayah

Memiliki media kampanye seperti: ular tangga, kartu bermain, lembar balik dan kipas edukasi



Menyusun buku pedoman edukasi Pencegahan Praktik Pemotongan/ Perluasan Genital Perempuan bagi tenaga kesehatan bekerjasama dengan Kemenkes, IBI, dan Asia Network to End FGMC.



Peningkatan Kapasitas Bidan dan Tenaga Kesehatan lainnya secara online.

Pengurangan Ketimpangan melalui Akses Kesehatan Seksual dan Reproduksi yang Inklusif, Termasuk di Wilayah Bencana

Tahun 2025 menjadi pembuktian PKBI dalam mendukung SDGs Tujuan 10 tentang Pengurangan Ketimpangan. PKBI fokus memastikan kelompok paling rentan seperti remaja, penyandang disabilitas, dan masyarakat di wilayah terpencil agar tetap mendapatkan akses kespro yang setara. Di tengah situasi bencana di mana fasilitas kesehatan sering lumpuh dan risiko kekerasan seksual meningkat, PKBI hadir sebagai aktor kunci yang menutup celah layanan agar hak kesehatan masyarakat tetap terpenuhi meski dalam kondisi darurat.





psikososial, serta distribusi kebutuhan kesehatan reproduksi. Layanan ini dirancang khusus agar aksesibel bagi semua orang, terbukti dengan adanya pendampingan adaptif bagi penyandang disabilitas agar mereka tidak tertinggal dalam mendapatkan perawatan medis.


Membangun Ketahanan dan Keadilan Sosial


Bagi PKBI, pengurangan ketimpangan bukan hanya soal memberikan bantuan sesaat, tapi juga membangun ketahanan komunitas pascabencana. Dengan memanfaatkan layanan *mobile* dan telekonseling di wilayah terpencil, PKBI memastikan kesinambungan layanan kespro bagi ibu hamil, remaja, dan penyintas kekerasan. Melalui kerja nyata ini, PKBI menegaskan bahwa pemenuhan hak kesehatan seksual dan reproduksi adalah bagian tak terpisahkan dari keadilan sosial, memastikan tidak ada satu pun individu yang ditinggalkan meski dalam kondisi paling sulit sekalipun.



Respons Cepat dan Inklusif di Wilayah Bencana


Melalui pendekatan respons darurat berbasis komunitas, PKBI menjangkau wilayah terdampak bencana mulai dari erupsi Gunung Lewotobi di NTT hingga banjir bandang di Sumatera Utara. Dengan total layanan mencapai 14.637 bagi 6.506 penerima manfaat, PKBI memberikan bantuan medis, konseling


 **Erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki, Flores Timur, NTT**
Total Layanan: 12.064
Total Penerima Manfaat: 5.026  23 klien disabilitas


 **Erupsi Gunung Semeru, Lumajang, Jawa Timur**
Total Layanan: 183
Total Penerima Manfaat: 95

 **Banjir Denpasar dan sekitarnya, Bali**
Total Layanan: 66
Total Penerima Manfaat: 34

 **Tanah Longsor Cilacap, Jawa Tengah**
Total Layanan: 249
Total Penerima Manfaat: 110  25 klien disabilitas

 **Respon Awal Banjir Pidie & Pidie Jaya, Aceh**
Total Layanan: 338
Total Penerima Manfaat: 298

 **Respon Awal Banjir Padang Pariaman, Sumatera Barat**
Total Layanan: 217
Total Penerima Manfaat: 134

 **Respon Banjir Bandang dan Tanah Longsor, Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat**
Total Layanan: 1.520
Total Penerima Manfaat: 809

 **14.637**
Total Layanan

 **6.506**
Total Penerima Manfaat
(48 Disabilitas)

Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI), organisasi nirlaba - Pelopor Gerakan Keluarga Berencana di Indonesia. Dengan Visi mewujudkan keluarga dan masyarakat Indonesia yang bertanggung jawab dan inklusif. Atas dedikasi serta kontribusinya dalam isu kesehatan dan khususnya pengendalian penduduk, pendiri PKBI, dr. R. Soeharto telah ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional pada tahun 2023. PKBI hadir sejak 23 Desember 1957, saat ini telah tersebar di 25 Provinsi dan 186 Kab/Kota.

Penanggung Jawab
Ketua Pengurus Nasional

DR. Ichsan Malik, M.Psi